

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan sektor publik menurut Braktakusumah dan Solihin (2004) adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraif pemerintahan dalam kerangka Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efesien untuk meningkatkan kinerja sesuatu pemerintahan daerah. Kefektifan dan kefisienan pengelolaan keuangan sektor publik sangat berkaitan dengan kinerja keuangan akan semakin baik apabila pengelolaan keuangan dioalah secara efektif dan efesien. Pengelolaan keungan daerah merupakan semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban (Hasugian 2021).

Menurut peraturan pemerintahan Nomor 58 Tahun 2006, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban termsuk dalam bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sendiri dan dapat dinialai secara moneter. Rangkaian proses atau siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses penganggaran yang terdiri dari perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD. Sedangkan pihak pengelolaan keuangan derah terdiri dari pejabat pengelolaan keungan daerah (PPKD) yang merupakan kepala satuan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah dan sekaligus bertindak sebagai bendahara umum daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, akuntabel, tertib,

efektif,efesien,dan ekonomis serta didasarkan atas prinsip keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sains Fakultas Sosial, 2018).

Akuntansi sektor publik merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu organisasi lembaga publik ataupun lembaga non publik yang berorientasi pada pelayanan, dimana dalam pengelolaan keuangan disektor publik dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan pemerintah dalam mengelolah keuangan publik. Menurut Mardiasmo (2016: 20) “ Transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik untuk orang-orang yang memerlukan informasi”. Pemerintah disebutkan kewajiban untuk memberikan dan menyediakan informasi, baik berupa informasi finansialnya maupun informasi lain yang kemudian dipergunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan.

Menurut Mardiasmo (2016 : 30) “ akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (agent) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggung jawaban, melaporkan, mengungkapkan semua kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut” instansi sektor publik memperoleh tuntutan agar lebih efisien mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan pengaruh negatif mengenai kegiatan yang dilaksanakan, karena sektor publik sering kali dipandang negatif bagi sebagian pihak, contohnya dianggap sarang dari inefisiensi, asas usul kebocoran dana sekaligus sumber pemborosan serta sektor selalu merugi maka timbul lah permintaan agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan kualitas dan profesionalisme dan harus fokus pada konse *value for money* (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas dan Transparansi merupakan salah satu parameter

dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan proses pemerintahan sehingga dapat dikatakan pemerintah yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak. (Pertiwi2015:2) mengungkapkan bahwa *good governance* yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas.

(Suryo,2008). Akuntansi sektor publik sering dianggap sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan sektor yang selalu mengalami kerugian sehingga adanya tuntutan agar institusi sektor publik mulai memperhatikan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, dalam pengelolaan anggaran lembaga sektor publik kerap, mendapatkan sorotan dari masyarakat salah satunya Bappelitbangda atau badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Bappelitbangda mengurus segala persoalan mengenai perencanaan dan pembangunan daerah sehingga bappeda dituntut untuk sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada lembaga publik, akuntansi sektor publik mendapatkan sorotan dari masyarakat agar anggaran yang dikelola secara akuntabel dan transparan dalam mengelola anggaran publik serta dalam menjalankan aktivitasnya memperhatikan biaya yang digunakan haruslah seminimal mungkin dan hasil yang maksimal agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Mardiasmo (2002:4). Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan

pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dapat optimal. Auditya (2013:24) berpendapat bahwa pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas, layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012:7) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, dan Transparansi pada Pengelola Anggaran di Universitas Bina Nusantara, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Dasar penulis untuk melakukan penelitian pada kantor Bappelitbangda provinsi NTT adalah untuk melihat dan menganalisa keterbukaan informasi akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pengelolaan anggaran telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif berkonsep (*value for money*).

Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (*public accountability*) pada era reformasi membawa dampak terhadap dalam proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dan akuntabilitas publik kini menjadi kajian yang marak, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Masyarakat menuntut pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan (Budiarto dan Puspitasari 2020) Selain menerapkan anggaran berbasis kinerja, pemerintah harus berprinsip akuntabel dan transp

arandalam pengelolaan anggarannya untuk mewujudkan *goodgo vernance*. Akuntabilitas publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyelewengan penyelenggaraan wewenang tetapi dapat juga meningkatkan kinerja pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Anggaran yang baik dapat dicapai jika pengelolaan anggaran telah transparan dan akuntabel (Mardiasmo 200). Sedangkan transparansi publik pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat mengerti dan dapat dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap organisasi pemerintah daerah merupakan bagian dari sektor publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan dana dan juga selalu merugikan (Widiato et.al 2018).

Fenomena yang mengenai keluhan dan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik baik secara langsung maupun melalui media masa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak adanya transparansi, sikap petugas atau pegawai yang kurang responsive. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurang profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan . pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melakukan informasi dalam penyajian laporan keuangan yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan amanah rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jumarti Achmad, Haeruddin Saleh,2020) dengan judul Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah pada Luwu Timur menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada kantor pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Dari hasil pengujian regresi maka diketahui bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah partisipasi penyusunan anggaran. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Victorinus Laoli (2019) dengan judul pengaruh akuntabilitas dan Transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintahan Kabupaten Nias menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* sedangkan variabel transparansi secara parsial tidak berpengaruh. Dan secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi sama- sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nanaban (2018) dengan judul pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *Value For Money* pada Pemerintah di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan yang berkonsep *Value For Money*.

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPELIT BANGDA Provinsi NTT)**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah “Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPELIT BANGDA Provinsi NTT)”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka persoalan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Bappelitbangda Provinsi NTT?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Bappelitbangda Provinsi NTT?
3. Bagaimana konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Bappelitbangda Provinsi NTT?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang akan di capai pada penelitian ini yaitu :

- a. untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Bappelitbangda Provinsi NTT.
- b. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Bappelitbangda provinsi NTT.
- c. Untuk mengetahui pengaruh konsep *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Bappelitbangda provinsi NTT.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik

Secara Akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah khususnya pada badan perencanaan pembangunan daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan adanya nilai-nilai transparansi atau keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adanya pengukuran kinerja dengan konsep *value for money* serta memberikan manfaat bagi para pemakai laporan keuangan dan manajemen pemerintahan.